

POTENSI PESANTREN AL HUSAINY DALAM MEMBANGUN EKONOMI TAUHID DI KABUPATEN BIMA (KAJIAN ANALISIS TAKSONOMI ETNOGRAFI)

Mega Oktaviany¹⁾, Nasaruddin²⁾, Arif Sofyandi³⁾

¹⁾Universitas Gunadarma, ²⁾Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, ³⁾Universitas Pendidikan Mandalika.

mega.octaviany@gmail.com, nasarhb@gmail.com,

sofyandiarif63@yahoo.com

Informasi Artikel

Terima 22/12/2022
Revisi 03/01/2023
Disetujui 04/01/2023

Kata Kunci:

Pesantren Al-Husainy, BMT, Ekonomi Tauhid

A B S T R A K

Pesantren bukan pilihan utama dalam pergerakan ekonomi di Indonesia, namun bisa menjadi potensi besar dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan agama, memperbaiki kehidupan sosial, budaya, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian mendalam mengenai implementasi dari pendidikan pesantren yang sangat potensial bagi ekonomi Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mencoba mempertegas bahwa peran pesantren di seluruh Indonesia berpotensi menghidupkan dan mengembangkan ekonomi warga, serta melihat potensi dan mendorong pesantren untuk berdikari secara ekonomi.

Pesantren Al Husainy di Kabupaten Bima mempunyai potensi dalam membangun ekonomi tauhid. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi dan taksonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun pesantren mempunyai bisnis, namun belum berkembang secara signifikan sesuai perkembangan zaman, padahal potensinya sangat besar. Potensi yang dimiliki Pesantren Al-Husainy dapat dikembangkan dengan baik melalui klaster bisnis yang sederhana yang mengajarkan para santri menjadi pengusaha muslim yang bermartabat dan berkesinambungan. Tidak menutup kemungkinan era hari ini memaksa sebuah institusi untuk terus mengikuti perkembangan zaman agar dapat tercipta ekonomi tauhid yang berkeadilan.

Keyword:

Al Husainy
Islamic Boarding
School, BMT,

A B S T R A C T

Islamic boarding schools are not the leading choice in the economic movement in Indonesia, but they have great

*monotheistic
economy*

potential to work with the community to develop religious education and social and cultural life, and become the center of Indonesia's economic growth. Thus, it is essential to carry out in-depth research regarding implementing Islamic boarding school education, which has excellent potential for the Indonesian economy. This research aims to emphasize that the role of Islamic boarding schools throughout Indonesia has the potential to revive and develop the people's economy, as well as to see the potential and encourage Islamic boarding schools to be economically independent.

The Al Husainy Islamic Boarding School in Bima Regency has the potential to build a monotheistic economy. This study uses a qualitative methodology with an ethnographic and taxonomic approach. The results indicate that although Islamic boarding schools have businesses, they have not developed significantly according to the times, even though the potential is enormous. The prospect of the Al-Husainy Islamic Boarding School can be well developed through a simple business cluster that teaches students to become dignified and sustainable Muslim entrepreneurs. Today's era may force an institution to keep abreast of the times so that a just monotheistic economy can be created.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari tatanan imperialisme dan tatanan kolonialisme. Namun di balik itu, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Selama 350 tahun, Belanda menguasai Nusantara kemudian digantikan oleh Jepang dalam jangka waktu 3,5 tahun. Tidak heran jika pertarungan fasisme (*Trotsky*) dan komunisme (*Stalin*) terus membayangi perkembangan bangsa Indonesia (Akbar & Ghufro, 2019).

Terbentuknya aspek ekonomi adalah di saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia mulai bebas secara politik. Saat itu, kedaulatan rakyat tidak hanya dicapai secara politik, tetapi juga dilalui melalui demokrasi ekonomi. Meskipun pada masa itu Indonesia masih menganut ekonomi belanda, namun semangat gotong royong dan tolong-menolong merupakan jati diri rakyat Indonesia yang sesungguhnya telah mampu membentuk citranya. Oleh karenanya, semangat tersebut merupakan ciri khas yang melekat dan menjadi identitas bangsa Indonesia.

Ekonomi Indonesia secara tidak langsung dipraktikkan dengan model *usaha bersama*, dalam artian tidak membunuh pelaku bisnis lainnya. Oleh karena kondisi perjuangan Indonesia dengan desentralisasi kepada koperasi sebagai dasar perekonomian Indonesia, bangsa ini ibarat pepohonan yang buahnya dapat dinikmati para rakyatnya. Lahirnya koperasi pada masa perjuangan adalah salah satu strategi dalam mengentaskan kemiskinan selama dijajah oleh Belanda (Hamisi & Fahm, 2018).

Di Malaysia, Tun Abdul Razak sejak pertengahan 1960-an telah mencanangkan program pemberantasan kemiskinan. Hal tersebut dilakukan dengan mengombinasikan strategi kesejahteraan melalui peran negara dan pengembangan koperasi ketika pemerintah Malaysia membangun sektor pertanian dalam bentuk perkebunan kelapa sawit (Rayya, 2012).

Begitu pun dengan Indonesia, koperasi didirikan sebagai strategi untuk menghidupkan semua lini ekonomi, baik dalam mencukupi senjata melawan penjajah maupun dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang pertama kali ada di Indonesia adalah pendidikan berbasis pesantren, yang kelahirannya jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Saat itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang umumnya terus menyelenggarakan pendidikan dengan misi mengader umat untuk menjadi *tafaqquh fiddin* dan memberikan motivasi pada kader ulama dalam misi dan fungsinya sebagai *warasat al-anbiya* (Marlina, 2014).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam cenderung tradisional yang mampu bertahan dari perkembangan sistem pendidikan saat ini. Dalam perjalanan perjuangan Indonesia, peran pesantren tidak diragukan lagi karena telah banyak memberikan kontribusi besar untuk membentuk sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas sebelum berdirinya sekolah umum di Indonesia. Dalam hal kualitas, pesantren melahirkan sumber daya manusia yang sangat tampak bagi pergerakan kaum muda. Mereka diajarkan semangat, kejujuran, dedikasi yang baik, bahkan melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw.

Pesantren bukan menjadi pilihan utama dalam pergerakan ekonomi di Indonesia, namun bisa menjadi potensi besar dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan agama, memperbaiki kehidupan sosial, mempertahankan budaya, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pesantren menjadi bagian penting dalam pengembangan lembaga Pendidikan, baik sosial, ekonomi, maupun agama (moral) yang mampu menjawab tuntutan serta tantangan

zaman yang semakin berkembang. Terdapat relevansi pesantren dengan pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Chusmeru, et al., 2017).

Berdasarkan tantangan dan tuntutan globalisasi, pesantren di Indonesia memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan ekonomi warga dengan berbasis ekonomi pesantren. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan penelitian mendalam untuk membuktikan bahwa implementasi dari pendidikan pesantren sangat memberikan peluang untuk Indonesia dalam bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini mencoba mempertegas bahwa peran pesantren di seluruh Indonesia berpotensi menghidupkan dan mengembangkan ekonomi warga. Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan pentingnya pendidikan pesantren sebagai solusi utama dalam perputaran ekonomi baik tingkat daerah maupun nasional di Indonesia.

Salah satu pesantren yang mempunyai potensi dalam membangun ekonomi tauhid di Kabupaten Bima adalah, pesantren Al Husainy karena pesantren tersebut telah lama berdiri dan telah banyak melahirkan generasi qur'ani. Selain itu, setiap tahunnya banyak siswa yang berlomba-lomba mendaftar di pesantren tersebut dengan berbagai keahlian.

KAJIAN LITERATUR

Definisi Pesantren

Kata pesantren sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Pesantren pada dasarnya berasal dari kata *santri*, berasal dari kata yang diambil dari bahasa Tamil India, yaitu *sasthra*/ yang berarti orang yang ahli dalam bidang kitab suci. Kata santri kemudian menjadi pesantren setelah diberi awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yang artinya adalah peserta didik yang tinggal di asrama. Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia. Kata "pesantren" mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren, sedangkan kata "santri" diduga berasal dari bahasa Sansekerta *sastri* yang berarti "melek huruf", atau dari bahasa Jawa "cantrik" yang berarti seorang yang mengikuti gurunya ke mana pun pergi. Pada perkembangannya, masyarakat kemudian memahami makna

pesantren sebagai tempat pendidikan yang memberikan pendidikan agama dalam porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan lainnya kepada para peserta didik yang disebut santri, yang sekaligus menyediakan tempat tinggal untuk digunakan para santri tersebut bermukim atau tinggal, yang kemudian disebut dengan pondok. Oleh karena itu, istilah pondok pesantren menjadi lazim digunakan untuk menunjukkan suatu tempat dimana terdapat kegiatan pendidikan yang diikuti oleh para peserta didik yang tinggal di lokasi tempat pendidikan (Marlina, 2014).

Secara teknis, pondok pesantren merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Ini menunjukkan hal penting sebagai karakteristik pondok pesantren sebagai lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Menurut Wahid (2001) sistem pendidikan pondok pesantren serupa dengan pendidikan militer yang memiliki karakteristik adanya bangunan beranda, yang merupakan tempat seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral.

Berdasarkan pengamatan dari kebanyakan pesantren, terlihat adanya dua paradigma dominan yang memengaruhi pandangan kalangan keluarga pesantren. Pertama, paradigma yang masih kuat mendominasi, yaitu pandangan bahwa pesantren sebagai lembaga keulamaan. Dalam konteks ini, pesantren hanya dianggap sebagai tempat untuk mendidik dan mengajarkan para santri pendidikan agama agar mereka kelak menjadi ulama yang berdakwah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pesantren dalam bidang-bidang selain keagamaan dipandang naif. Misalnya, pengembangan pesantren untuk pendidikan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, wirausaha, dan lain sebagainya. Kedua, paradigma yang muncul sekitar tahun 1970-an, yaitu pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat. Menurut paradigma ini, pesantren adalah lembaga yang strategis dan sangat sesuai untuk berperan dalam pembangunan masyarakat sekitar. Pesantren dianggap mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi berbagai bentuk masyarakat yang ada. Selain itu, pesantren memiliki bahasa-bahasa yang diterima masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak hanya sebagai tempat lahirnya calon ulama, tetapi juga harus dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini lahir bersama dengan gagasan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang sedang digiatkan oleh Menteri Agama RI, Prof. Mukti Ali yang mencoba memperluas kegiatan pendidikan pesantren secara horizontal, yang berarti pendidikan pesantren tidak hanya mencakup pelajaran keagamaan.

Sejalan dengan itu, pondok pesantren memiliki andil cukup besar bagi dunia pendidikan, baik jasmani, rohani, maupun inteligensi karena para santri memiliki pedoman yang ideal dalam bersikap dan berpikir yang dilandasi oleh sumber nilai dan norma-norma agama. Oleh karena itu, pesantren sering disebut sebagai alat transformasi kultural. Kegiatan pembelajaran yang terjadi di pesantren tidaklah sekadar pemindahan ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, tetapi yang terpenting adalah penanaman dan pembentukan nilai-nilai tertentu kepada santri (Fajrin, 2016).

Peran Pesantren dalam Perubahan Sosial

Pendirian pesantren kini tidak hanya berfokus pada kajian kitab, tidak menjadi pendidikan *an sich*. Pesantren mulai beradaptasi dan peran-peran sosial selalu dilakukan dengan segala cara halal. Bahkan, di masa prakemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, pesantren ikut andil dalam perpolitikan, keamanan, dan pertahanan melalui kiai dan ulama. Fenomena ini memberikan pelajaran bahwa pesantren tidak hanya menjadi “menara gading” yang tidak mampu beradaptasi pada lingkungannya (Fajrin, 2016).

Selain itu, pendidikan pesantren telah berkembang, tidak hanya berkuat dalam pelajaran keagamaan, tetapi juga berpartisipasi dalam pengetahuan alam serta sosial. Kemudian di era 2000-an, pesantren juga ikut andil dalam mengambil fungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, muncullah pesantren dengan berbagai praktik ekonomi yang harus memberikan manfaat masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa pesantren tidak kehabisan inovasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi, sesungguhnya pesantren adalah lembaga sosial dan pendidikan yang dapat menjadi pilar pemberdayaan masyarakat (Chusmeru, et al., 2017).

Sehubungan dengan itu, terdapat empat fungsi pondok pesantren dalam menjalankan fungsi sosialnya, di antaranya (1) pusat pengkaderan generasi qur’ani atau pemikir-pemikir agama (*center of excellence*); (2) mencetak sumber daya manusia yang bermartabat dan bermoral (*human resource*); (3) lembaga yang memiliki kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*); dan (4) pondok pesantren sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) (Suhartini dalam Halim, 2005).

Pada sisi lain, kiai atau ulama juga tidak terlepas dalam pengembangan pesantren dan perubahan sosial. Oleh karena itu, para ulama sangat berusaha memperbaiki pandangan-pandangan pesantren sesuai dengan keadaan sosial, terutama pengembangan dalam bidang ekonomi semakin digairahkan untuk memajukan kebudayaan masyarakat.

Peran Ulama dalam Perubahan Sosial

Ulama termasuk sebagai pihak dalam kehidupan masyarakat yang berpotensi melakukan kontestasi dengan entitas yang lain untuk melakukan rekayasa sosial. Masyarakat di Indonesia merupakan komunitas yang cukup religius sehingga para pemuka agama atau ulama menjadi sosok yang cukup terpandang di masyarakat dan bahkan menjadi panutan. Ulama memiliki kharisma yang dibutuhkan untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Sebagaimana dijelaskan oleh Weber, “... *certain quality of an individual's personality by virtue of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities*” (Zulkifli, 2013).

Barnes (1978) dalam Marlina (2014) menyatakan bahwa kharisma ibarat sebuah otoritas yang sangat tergantung kepada pengakuan sebuah kelompok masyarakat. Pengalaman ini sangat penting, karena tanpa adanya pengakuan maka seseorang tidak akan mempunyai otoritas di kelompok tersebut. Kharisma muncul juga dari kekuatan dinamis seorang tokoh dan kekuatan personalitasnya.

Hiroko Horikoshi (1987) dan Clifford Geertz (1981) mempertegas teori mengenai peran ulama yang sangat penting dalam suatu komunitas melalui serangkaian studi yang mereka bangun. Salah satu ilustrasi fungsi seorang ulama di masyarakat disebut dengan istilah *culture brokers* yang menunjukkan fungsi mediasi ulama. Mediasi di sini adalah mengomunikasikan atau bahkan memadupadankan antara berbagai kepentingan yang muncul di suatu komunitas. Ulama sangat berperan sebagai teladan suatu kepentingan dan tujuan tertentu karena kekuatan yang mereka miliki (Zulkifli, 2013).

Pada sisi lain, ulama adalah sumber legitimasi keagamaan dan penggerak perubahan masyarakat. Hasil studi yang dilakukan Horikoshi (1987) mendukung hal tersebut karena ditemukan bahwa ulama adalah sumber perubahan sosial, tidak saja bagi lingkungan pesantren, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam studi Geertz (1981), yaitu pengaruh ulama terletak pada budaya setempat. Dengan begitu, ulama sangat mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mudah dimengerti. Begitu pula, pesantren sebagai institusi juga memiliki andil dalam dunia sosial yang sangat vital bagi masyarakat sekitar. Pesantren dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, lembaga *sosial engineering*, juga wadah untuk menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi masyarakat. Dalam dunia pesantren, ulama merupakan simbol kekuatan ilmu dan figur yang menjadi

panutan dalam penentuan keputusan dan kebijakan. Otoritas tersebut sangat melekat kuat pada diri seorang ulama (Lukens-Bull, 2005; Dhofier, 1994 dalam Marlina, 2014).

Dalam bidang ekonomi, ulama merupakan *marketer* terbaik karena masyarakat sangat percaya saran dan nasihat dari ulama. Gerakan-gerakan ekonomi syariah bisa dilakukan dimulai dari ekonomi pesantren yang dilakukan oleh ulama, atau dengan membuka koperasi di pesantren yang berfungsi tidak hanya untuk internal pesantren saja, tetapi juga untuk masyarakat sekitar, serta memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar dalam hal pertanian.

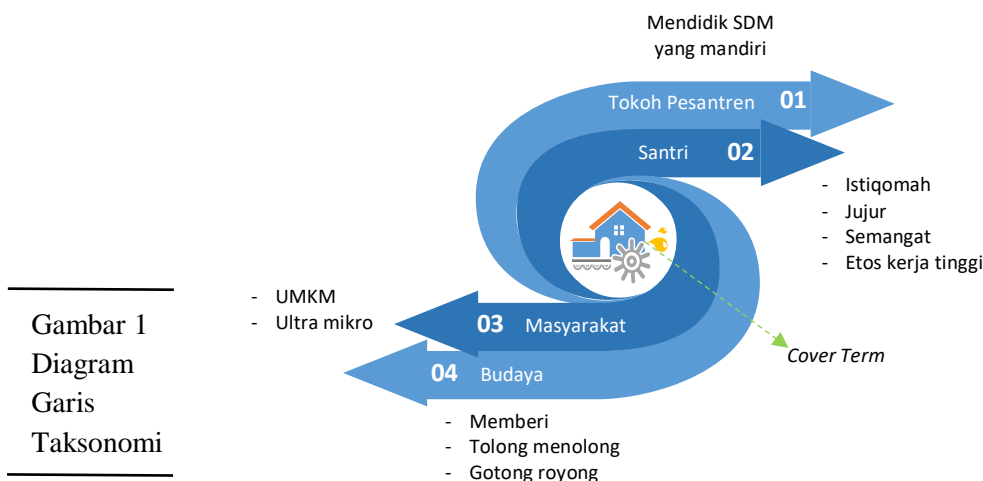
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi pendidikan pesantren secara mendalam serta kehidupan sehari-hari santri. Selain itu, etnografi juga dapat mengidentifikasi bagaimana individu memberi makna pada ekonomi dan lingkungannya. Kegunaan utama studi etnografi adalah untuk memberi makna pada pengalaman dan peristiwa yang dialami baik oleh seorang individu maupun kelompok (Creswell, 2014).

Dalam penelitian etnografi ini, digunakan teknik pembauran. Tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi tentang pesantren Al-Husainy di Kabupaten Bima dengan mengedepankan budaya Bima. Dengan demikian, wawancara akan dilakukan kepada beberapa guru dalam pesantren juga warga di sekeliling pesantren tersebut. Beberapa ahli mengemukakan pengertian tentang penelitian etnografi salah satunya adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural (Emzir, 2011).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melakukan pembauran dan observasi, seperti salat bersama santri di masjid, melihat langsung aktivitas para santri dan guru pesantren Al-Husainy, dan selanjutnya melakukan wawancara mendalam yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam proses wawancara, dilakukan perekaman secara audio yang setelah itu secepatnya ditranskripsi untuk kemudahan proses analisis. Setelah itu, dilakukan penelusuran dokumen masyarakat setempat dalam mempraktikkan kebudayaan. Proses penelitian di lapangan menggunakan dokumentasi seperti foto dilakukan guna memberikan jaminan keakuratan dalam penelitian ini.

Ada empat bentuk analisis data penelitian kualitatif etnografi, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, serta analisis kultural. Penelitian ini menggunakan analisis taksonomi dan tematik, yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Penelitian dilakukan dengan observasi terfokus. Analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan oleh peneliti menjadi *cover term* dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi kemudian akan disajikan dalam bentuk diagram kotak (*box diagram*), diagram garis dan simpul (*lines and node diagram*), dan *outline* (Wijaya, 2018). Sementara, pengertian analisis tematik adalah upaya mendeskripsikan secara menyeluruh karakteristik kultural yang memengaruhi perilaku sosial individu. Fokus utama laporan penelitian adalah narasi deskriptif tentang konteks dan tema-tema kultural yang memengaruhi perilaku sosial individu. Fokus ini sesuai dengan pengertian etnografi yang berarti penelitian untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena kebiasaan yang lahir di pesantren tersebut (Hanurawan, 2016). Peneliti membuat daftar kategori yang menonjol sesuai dengan tujuan penelitian yang terdapat dalam data metode pengumpulan data. Selanjutnya, diberikan label untuk kategori yang muncul dalam pendataan tersebut. Berdasarkan pada data yang menonjol tersebut, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.



Gambar 1
Diagram
Garis
Taksonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pesantren Al Husainy

Pondok pesantren Al-Husainy didirikan oleh Tuan Guru H. Ramli H. Ahmad di Bima pada tanggal 12 Oktober 1992. Pada saat pendirian, jumlah staf pengasuh masih terbatas, yaitu satu orang pimpinan pondok pesantren dan dua orang kepala sekolah, serta 1 orang bendahara dan empat guru BP. Pegawai biasa hanya berjumlah 30 orang, pegawai tata usaha 10 orang, dan penjaga pondok sebanyak dua orang. Pesantren tersebut merupakan wadah pendidikan formal dan nonformal untuk melahirkan kader ulama dan bangsa yang beriman dan bertakwa. Pesantren tersebut bernaung di bawah Departemen Agama Kota Bima, secara operasional dikelola oleh Yayasan Nurul Qur'an Kota Bima (Wawancara Nasaruddin, 2019).

Nama Al-Husainy dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Tuan Guru Haji Husainy yang dianggap memiliki andil besar sebagai pendiri pondok pesantren dalam membangun masyarakat yang sedang terbelakang, dan kebodohan tentang masalah pendidikan dan agama masih marak. Sekitar tahun 1935 M, perguruan ini secara historis menyelenggarakan pendidikan secara halaqah. Tuan Guru Haji Husainy membentuk pengajian yang dilakukan secara sederhana. Pada masa ini, para santri tidak dibedakan berdasarkan umur, status sosial, dan latar belakang apa pun karena tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Sementara, muatan kurikulum yang diajarkan oleh Tuan Guru haji Husainy pada masa itu yaitu seputar pada pelajaran ilmu-ilmu Al-Qur'an (Mubaroq, 2016).

Pada umumnya adat orang Bima, rumah guru ngaji sebagai tempat keluarga bagi mereka sekaligus sebagai tempat untuk mengajarkan pendidikan agama Islam dan ilmu Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan keterbatasan tempat untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar.

Setelah Tuan Guru Haji Husainy wafat, pengajian Al-Qur'an dan pendidikan agama Islam dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Tuan Guru Haji Abubakar Husainy pada tahun 1969 M. Tempat pengajian masih berlangsung menggunakan rumah beliau dan murid semakin bertambah dan tersebar hingga ke pelosok desa (Wawancara Dedi Mawardin, 2019). Pada tahun 1981, pengajian dilanjutkan oleh Tuan Guru Haji Ramli Ahmad, sekaligus sebagai menantu Tuan Guru Haji Abubakar Husainy. Pada masa Tuan Guru Haji Ramli, rumah pengajian tersebut dibuatkan yayasan dan diberi nama Nurul Qur'an. Yayasan tersebut dirintis oleh H. Umar. Haji Abubakar Husainy selaku ketua yayasan, yang di dalamnya diadakan program *ma'had* pondok pesantren dan proses kegiatan belajar-mengajar secara formal.

Awal pendidikan pesantren secara formal yaitu Madrasah Tsanawiyah Al-Husainy pada tahun 1996 M. Selanjutnya, didirikan Madrasah Aliyah Al-Husainy pada tahun 1999 M untuk santri yang masih berkeinginan melanjutkan belajar pendidikan agama Islam di Al-Husainy. Kemudian, pesantren semakin berkembang dan informasi terkait pesantren semakin meluas di kalangan masyarakat. Selain itu, pada saat yang sama sekolah dasar di Bima sangat terbatas sehingga tahun 2007 pengurus Yayasan Nurul Qur'an mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Husainy sebagai upaya untuk mendidik para santri lulusan taman kanak-kanak. Pembangunan dan fasilitas sarana prasarana kegiatan belajar-mengajar murni dari hasil partisipasi penuh dari masyarakat sekitar (Wawancara Islamudidin, 2019).

Seiring perkembangan pesantren dan telah banyak melahirkan alumni yang hebat, kurikulumnya semakin diperbagus secara formal. Aktivitas formal yang dimaksud meliputi pendidikan madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah dengan 70 persen kurikulum yang berlaku pada Kementerian Agama dan 30 persen dari kurikulum internal yang dikelola oleh pondok pesantren. Sementara, pendidikan nonformal berupa pendidikan dalam bentuk pengajian yang diselenggarakan oleh pesantren dengan menggunakan metode mendengarkan penjelasan ustaz dan di lain waktu santri akan mengulangi apa yang dijelaskan ustaznya. Kurikulum yang diterapkan mencakup penanaman pendidikan akhlak dan ibadah serta yang paling diutamakan adalah *qiraatul mujawadah* dan *tahfizul Qur'an* (Mubaroq, 2016). Pembinaan kurikulum tersebut merupakan ciri khas pesantren Al-Husainy agar santri mampu membaca Al-Qur'an secara bagus dan indah serta mampu untuk menghafal Al-Qur'an.

Adanya Pesantren Al-Husainy membentuk masyarakat Bima cinta kepada Al-Qur'an dari yang sebelumnya menganut agama Makamba Makimbi pada agama Hindu dan Budha. Pesantren tersebut dapat dikatakan membantu para Sultan Bima dalam dakwahnya dan menentukan posisi sanksi pada masyarakat Bima saat itu. Bahkan dalam praktik ekonomi, hasil panen pesantren saat itu berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat Bima. Contohnya, pada hasil panen, masyarakat Bima wajib mengeluarkan sedekahnya dan disimpan di *uma lengge*, yaitu rumah adat Bima untuk menampung hasil panen dan pangan sebagai stok ekonomi masyarakat Bima pada masa kesultanan. Dalam titah sultan terkait hal ini terdapat andil para Tuan Guru Pesantren Al-Husainy dalam menebar dakwahnya (Wawancara Malingi, 2019).

Menurut observasi peneliti, pesantren ini sangat menentukan segala sudut kehidupan, terutamanya pembangunan ekonomi pada masyarakat Bima karena melihat

posisi pesantren berada di daerah strategis di Kota Bima untuk melangsungkan kehidupan ekonomi. Dari sejarah tersebut, terbukti bahwa pesantren Al-Husainy sangat berpotensi dalam membangun ekonomi tauhid yang bisa dilakukan seluruh santri dalam berinovasi melalui *entrepreneurship* yang biasa dikenal dengan *santripreneur*.

Potensi Pesantren Al Husainy dalam Membangun Ekonomi Tauhid

Sebagai lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan, pesantren mempunyai peran multifungsi. Tiga peran utama pesantren meliputi fungsi sebagai lembaga keagamaan, lembaga Pendidikan, dan lembaga pengembangan kemasyarakatan. Hanya saja, realitas kapasitas kelembagaan pesantren yang berbeda-beda menyebabkan karakter kemandirian yang dibangunnya berbeda-beda sesuai proses dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pesantren (Fauroni, 2011). Salah satu hal yang harus ditambah pada kemandirian pesantren yaitu memiliki usaha tersendiri dengan mengajarkan para santri berbisnis secara syariah.

Pesantren selalu berproses bersama masyarakat dan berkarakter sosial kemasyarakatan sebagai *center of excellence* bagi pembinaan potensi dan pelayanan sosial bersama masyarakat di sekitarnya. Atas karakter itulah Van dan Berg serta Hurgronje dan Geertz menyimpulkan bahwa pesantren betul-betul berpengaruh kuat dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, politik, dan keagamaan, terutama di masyarakat pedesaan (Dhofier, 1982).

Pesantren Al-Husainy mempunyai usaha sebagai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Bisnis yang dikembangkan oleh pesantren adalah secara kelembagaan mempunyai koperasi dan BMT, serta memiliki ladang untuk menanam sayuran dan berternak sapi. Komoditas yang diproduksi pesantren tersebut sangat membantu ekonomi masyarakat setempat. Menurut Ketua Yayasan Islamudin, tujuan bisnis ini memberdayakan masyarakat setempat, bukan mencari keuntungan semata karena bisnis merupakan salah satu untuk memberdayakan umat agar terbebas dari kefakiran dan kekufuran. Dalam rukun Islam, hanya syahadat saja yang tidak memerlukan biaya. Oleh karenanya, Islam mengajarkan untuk terus berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan segala produk yang *halalan thayyiban*.

Pada koperasi dan BMT, pesantren membantu masyarakat yang membutuhkan keperluan dengan praktik syariah sehingga keberadaan lembaga tersebut pada ruang lingkup pesantren membentuk *mindset* bahwa pesantren bukan lembaga pendidikan saja,

melainkan juga lembaga yang mampu membangkitkan ekonomi umat secara kafah. Selain itu, dalam hal pertanian serta peternakan, saat panen masyarakat diberi kemudahan untuk mengakses sayuran yang organik dan sehat. Gerakan menanam oleh santri pada pesantren tersebut membentuk satu langkah untuk hidup sehat. Pesantren tersebut sejak pendiriannya dan seiring perkembangan zaman sangat berperan penting dalam dakwah Islam di Bima.

Apa yang dilakukan pesantren sejak zaman berdirinya hingga saat ini dalam melakukan ekonomi tauhid merupakan satu langkah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut merupakan sikap yang menonjol dalam perilaku bisnis di pesantren. Kekeluargaan ini bukan bermakna hubungan darah sebagaimana dalam bisnis keluarga, melainkan ikatan batin dan komitmen yang telah dibangun antara pesantren, kelompok tani, alumni, dan masyarakat wilayah sekitar.

Namun, dari ekonomi yang dibangun pesantren Al-Husainy belum kepada inovasi digitalisasi yang mengikuti perkembangan zaman hari ini. Bisa dilihat bahwa digitalisasi sangat mendorong arus perputaran ekonomi, khususnya bagi usaha mikro dan kecil. Jika dilihat data Kementerian Koperasi pada pulau Sumbawa, jumlah koperasi dan UMK Bima mencapai 24.893 usaha yang aktif. Namun, dari jumlah tersebut hanya 20 persen yang mengarah kepada inovasi dan kreativitas produk.

Walaupun visi pesantren tidak ke arah santri berdikari, tetapi gerakan itu bisa dilakukan untuk kemandirian pesantren dan kekuatan santri mandiri saat menjadi alumni. Dalam upaya tersebut, pesantren ditempatkan sebagai motor penggerak dalam menanamkan nilai-nilai kebersamaan. Tidak dapat dipungkiri, institusi yang berdiri di zaman berbeda akan mengikuti perkembangan zamannya. Dapat mempersiapkan para santri agar mempunyai pengetahuan yang baik dan dapat mandiri secara ekonomi merupakan cita-cita setiap institusi karena ilmu dasar tentang agama Islam sangat kuat sehingga belajar tidak menggantungkan diri pada orang lain kecuali tuhan merupakan satu kekuatan berdikari.

Jika dilihat dari gerakan pesantren Al-Husainy hari ini, kekuatan gelombang arus teknologi cukup signifikan karena masih mampu mencetak kader tangguh dalam berislam. Potensi pada pesantren tersebut sangat besar apabila menggiatkan kemandirian *santripreneur* yang kreatif dari peternakan dan pertanian yang dimiliki pesantren. Mengapa pesantren tepat dalam pengembangan agrobisnis pada upaya pemberdayaan umat? Alasannya karena *inna a'dhamalkasbi az-zar'u*, pertanian adalah profesi yang paling utama, hasil pertanian merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat (Fauroni, 2011). Selanjutnya, Bima merupakan daerah penghasil komoditas terbaik karena tanahnya yang subur sehingga masyarakat Bima mayoritas bertani untuk memenuhi ekonomi rumah tangga. Selain itu, pertanian merupakan pekerjaan yang paling mudah, tidak mempunyai syarat harus berpendidikan tinggi dan memiliki ukuran berat badan, semua orang bisa bertani. Terakhir, urat nadi kehidupan masyarakat Bima berada pada petani.

Oleh karena itu, dari gambaran Bima dalam bidang pertanian, pesantren memiliki potensi besar dalam melakukan inovasi produk, di antaranya membuat keripik lele menjadi camilan atau lauk bagi masyarakat dan menjadi produk khas pesantren. Selain itu, pesantren mampu mengelola sayuran hasil perkebunan dan pertanian menjadi produk baru. Bima merupakan penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, namun saat ini belum ada inovasi baru dalam pengelolaan bawang tersebut selain bawang goreng dan keripik bawang. Padahal, jika dilihat bawang merah merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan setiap hari.

Adapun strategi penjualannya bisa menggunakan BMT atau koperasi pesantren yang telah berdiri lama. Strategi dari peneliti dengan melihat potensi yang ada dapat dilakukan dengan model klaster bisnis karena merupakan sektor riil dalam pengembangan usaha pada pesantren. Berikut proses yang dijalankan pihak-pihak yang terlibat di Pesantren Al-Husainy.

1. Petani

Proses kerja yang dilakukan petani adalah penanaman dan panen. Seluruh hasil panen dapat diolah dahulu untuk dijadikan produk, seperti bawang bisa dibuat menjadi bawang goreng dengan memberdayakan ibu-ibu PKK yang bercirikan atau membuat produk inovasi lain dari bawang merah. Saat ini, Bima hanya mempunyai produk khas berupa tenunan bukan berupa makanan. Adapun makanan khas banyak mengadopsi dari Makassar, Sulawesi Selatan, belum ada olahan Bima sendiri yang menjadi *brand* Bima itu sendiri. Ketika telah menjadi produk, BMT pesantren Al-Husainy menampung untuk dilakukan proses lanjutan sebelum dijual ke pasaran. BMT di sini bisa menjadi pengepul atau memproduksi hasil panen tersebut sehingga bisa menjadi bahan yang berkualitas tinggi.

2. BMT

Baitul maal wa tamwil di sini bisa berfungsi sebagai lembaga penyedia bibit atau obat pertanian, memproduksi bahan, atau membuat pelatihan untuk para santri dengan sistem syariah. Setelah produk selesai dibuat, BMT bisa melakukan kerja

sama dengan lembaga mana pun yang menjadi khas Bima yang dibuat oleh pesantren dengan sistem tauhid.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah di sini bertugas mengawasi perputaran finansial di dalam BMT tersebut, mulai dari pembiayaan, pembelian, penjualan, sampai pada pemasaran. Jika tidak sesuai syariah, akan ditinjau kembali dan diubah sesuai dengan DSN MUI terkait akad-akad yang digunakan mengenai pengembangan produk (Oktaviany, 2016).

4. Pemerintah

Pemerintah tidak hanya memberikan kontribusi berupa dukungan, tetapi juga dalam bentuk modal terkait pembangunan keberhasilan pesantren dalam melahirkan produk baru. Hal yang terpenting, peran pemerintah dalam rencana potensi pesantren tersebut adalah membuat regulasi yang kuat tentang BMT di daerah agar lembaga tersebut bisa bertahan dan memiliki manajemen yang baik (Oktaviany, 2016).

Dari proses yang dijelaskan di atas, telah terlihat gambaran tentang potensi pesantren yang telah lama bergerak dalam bidang agama Islam. Adanya inovasi produk dari bisnis pesantren yang telah berdiri menjadikan pesantren semakin besar dan santri semakin berdikari.

Pesantren Al-Husainy dengan berbagai potensi yang dimilikinya layak untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah di Bima. Di sisi lain, kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat memerlukan peran pesantren, apalagi Kabupaten Bima yang mayoritas masyarakatnya muslim. Pesantren Al-Husainy masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh serta menjadi pusat pengkaderan ulama dan dai yang terlegitimasi di masyarakat Bima. Selain itu, Pesantren Al-Husainy pada dasarnya menjalani bisnis yang sangat berkembang, namun memang perlu adanya inovasi yang kuat. Apalagi, sebenarnya produk-produk ekonomi syariah adalah kekayaan pesantren yang digali dari *fiqh muamalah* dalam kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Seharusnya, para santri lebih memahami ekonomi syariah daripada yang lain karena mereka sehari-hari bergelut dengan keilmuan tauhid (Sutikno, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan ekonomi dan bisnis serta pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perluasan misi yang dilakukan pesantren Al-Husainy, yaitu adanya lembaga ekonomi seperti koperasi, BMT, dan peternakan serta pertanian yang masih berjalan. Namun, dalam pemberdayaan ini belum ada inovasi baru atau model pesantren yang kuat secara terpadu dan terstruktur serta berkesinambungan dalam suatu lingkungan yang mendukung serta belum ada jaringan elemen masyarakat yang kuat dalam asas kekeluargaan berdasar komitmen pengabdian pesantren Al-Husainy pada masyarakat yang hakikatnya bermakna pengabdian kepada Allah SWT sebagai aplikasi kewajiban ibadah.

Berdasar hal itu, dari potensi yang dimiliki pesantren Al-Husainy, jika dilakukan dengan baik, bisa dibentuk klaster bisnis yang sederhana dengan mengajarkan para santri menjadi pengusaha muslim yang bermartabat dan berkesinambungan. Tidak menutup kemungkinan era hari ini memaksa sebuah institusi untuk terus mengikuti perkembangan zaman agar santri terus menjadi pebisnis muslim seperti yang diajarkan Nabi Muhammad saw., sehingga dapat tercipta ekonomi tauhid yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., & Ghufron, M. I. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2868>
- Chusmeru, Masrukin, & Pangestuti, S. (2017). Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pemberdayaan Ekonomi Santri. *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII*, 5(November), 990–998.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fajrin, A. H. (2016). Peran Pendidikan Ekonomi di Lingkungan Pesantren dalam Pembentukan Perilaku Ekonomi yang Berwawasan Pancasila. *National Conference on Economic Education*.
- Fauroni, R. L. (2011). Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 5(1), 1–17.
- Hamisi, M. A., & Fahm, A. O. (2018). The Intellectual and Spiritual Contribution of Nuruddin Ar-Raniri to Islamic Education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 169. <https://doi.org/10.15575/jpi.v3i2.1420>

- Marlina, M. (2014). Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 117–134. <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.532>
- Mubarog, F. (2016). Pondok Pesantren Al-Husainy Kota Bima (Studi Historis tentang Peranannya terhadap Perkembangan Islam di Bima). *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Oktaviany, M. (2016). Annual Conference on Islamic Studies (ACIS). *AICIS IAIN Raden Intan Lampung*, 210–225.
- Rayya, H. (2012). *Telaah Penafsiran Dawam Rahardjo dalam “Ensiklopedi Alquran”* A. www.Academia.Edu.
- Rimbawan, Y. (2012). Pesantren dan Ekonomi. *Annual International Conferences on Islamic Studies (AICIS XII)*, 1180–1199.
- Sutikno. (2020). Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Qolamuna*, 6(1), 1–10.
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley. *ResearchGate, Maret*, 1–9. <https://www.researchgate.net/publication/323557072>
- Zulkifli, Z. (2013). The Ulama In Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37(1), 180–197. <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i1.79>